



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

LAPORAN KINERJA 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 ini dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Perikanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Putussibau, 13 Maret 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAMBANG, S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 199503 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perikanan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Perikanan tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021 - 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Inspektorat atas Akuntabilitas kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan nilai sebesar 61,40 dengan predikat “B” predikat tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Akuntabilitas Kinerja ‘BAIK’ yaitu Implementasi Akip sudah baik pada perangkat daerah, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Nilai Evaluasi Tahun 2023 “TIDAK DIPERBANDINGKAN” Hal ini berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode sampai dengan tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perikanan tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas perikanan adalah Meningkatnya Produksi Perikanan mendapat predikat nilai Baik Realisasi kinerja Tahun 2023 yang mendapat predikat “B” jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Perikanan 2021 –

2026 dengan predikat “A”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah belum mencapai mencapai 100% walaupun metodenya berbeda tapi secara penilaian Sudah “ BAIK “

Sasaran 2 : Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap mendapat predikat nilai Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian tergolong Sangat Baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya
Sasaran meningkatnya produksi Ikan Budidaya dengan anggaran sebesar 1.936.255.650 sedangkan realisasinya sebesar 1.763.663.089 hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan budidaya yang tidak terlaksana atau, Capaian Efisiensinya lebih tinggi dari bidang yang lainnya. Yaitu sebesar 9, 91 %

Sasaran 4 : Meningkatkan Produksi Ikan Olahan hasil Ikan dalam Jumlah dan ragam Jenis Sasaran meningkatnya produksi Ikan Olahan dengan anggaran sebesar 690.342.150 realisasi anggaran sebesar 688.497.247 dengan capaian 99, 60 dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 1%.

Dinas Perikanan tahun 2023 mendapat penghargaan sebaga juara 1 dengan katagori OPD dengan aploud paling banyak tentang berita Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perikanan telah dilaksanakan dengan sangat Baik, dimana sebanyak 8 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Sangat Baik yaitu:

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan pagu 13.300.000 realisasi Rp 13.300.000 atau 100 %
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu 6.075.000 realisasinya 6.075.000 atau 100 %
3. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan pagu 16.560.000 terealisasi 16.560.000 atau 100%
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11 000.000 dengan realisasi 11 000.000 atau 100 %

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu 22.240.000 realisasi 22.240.000 atau 100 %
- 6.
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.400.000 realisasi 2.400.000 atau 100 %
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 10.000.000 realisasi 10.000.000 atau 100 %
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pagu 7.200.000 realisasi 7.200.000 atau 100 %

beberapa sub kegiatan yang capaiannya dengan katagori cukup yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan pagu Rp 10.800.000 teralisasi 5.751.000 atau 53%
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan pagu Rp 2.900.000 terealisasi Rp 1.569.800 atau 54%

LapanganSecara keseluruhan serapan anggaran di Dinas Perikanan dengan Pagu Rp 9.601.989.718 dengan realisasi sebesar Rp. 8.976.410.001 atau 93, 48 % capaian pada tahun 2023 bisa dikatakan Sangat Berhasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Halaman

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. Pendahuluan | 1-3 |
| 2. Susunan Organisasi | 3 |
| 3. Sumber Daya Aparatur | 4 |
| 4. Sumber Daya Keuangan | 5 |
| 5. Sarana dan Prasarana | 6-7 |
| 6. Permasalahan Utama | 8 |

BAB 11 PERENCANAAN KINERJA

- | | |
|--|-------|
| A. Rencana Strategis (rentra) tahun 2021-2026) | 10-14 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 16-18 |

BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA

19

- | | |
|----------------------------------|--------|
| A. Capaian Organisasi | 19-51 |
| B. Realisasi Anggaran | 52- 54 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja | 54-55 |

BAB IV PENUTUP

- | | |
|----------------------------|-------|
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Upaya Pemecahan Masalah | 56-58 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu azas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023. Kemudian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara reformasi birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Perikanan adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian mendapat perubahan nomeklatur berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perikanan.

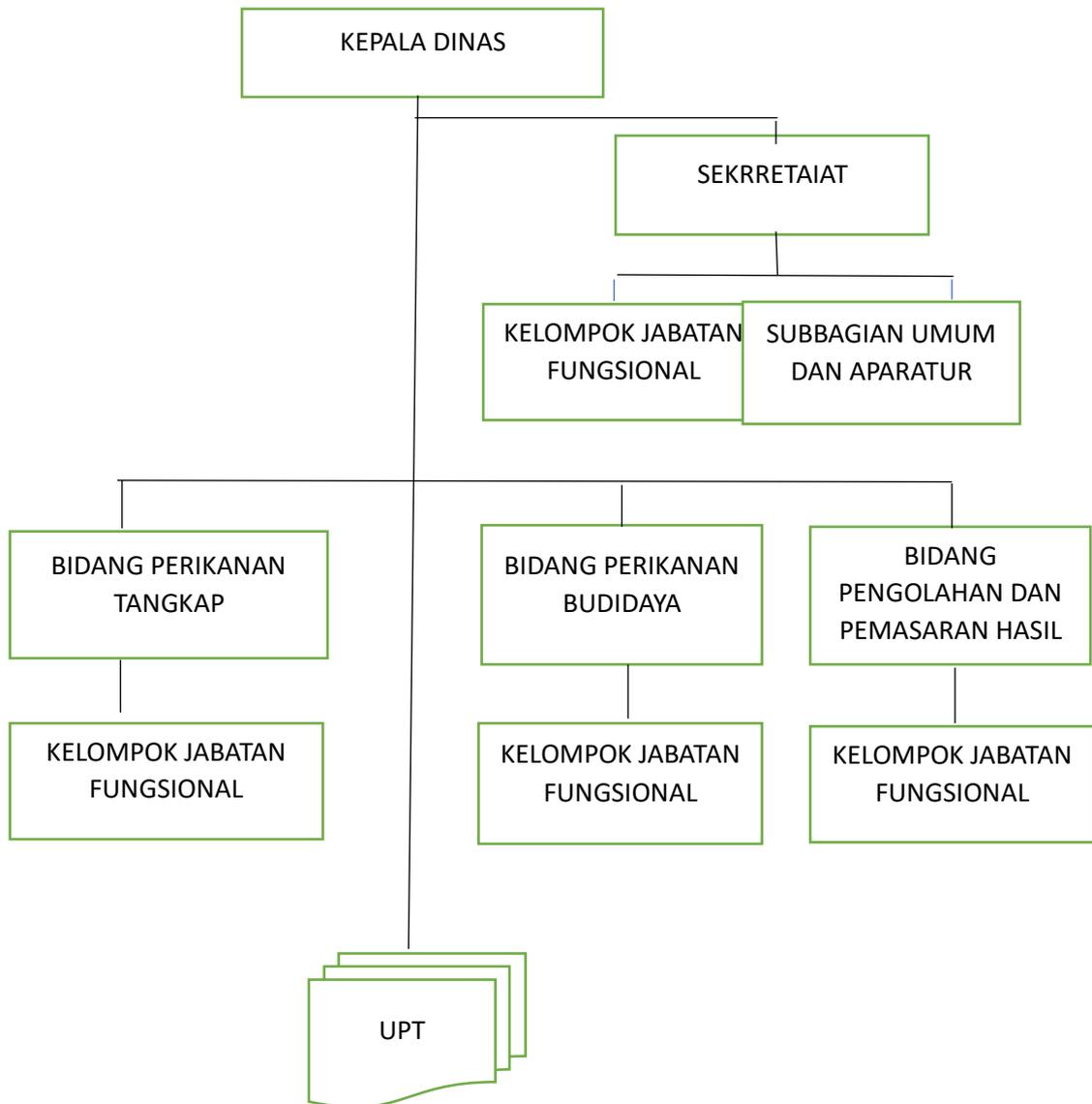
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Perikanan, Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, penyampaian laporan secara periodik serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tupoksinya.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KAB. KAPUAS HULU



3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 90 (Sembilan Puluh) Orang pegawai (data sampai dengan Desember 2023) dengan komposisi sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 28 orang ditambah dengan, Pegawai dengan Perjanjian Kinerja sebanyak 2 orang sehingga pegawai negeri sipil dan PPPK berjumlah 30 orang

Daftar Pegawai PNS dan PPPK Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu sampai dengan Desember 2023.

Tabel 1.1 Kualifikasi Pendidikan berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	ESLON/NO N ESLON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG				DIKLATPIM	
		S 2	S1/D 4	D 3	SLT A	SLTP/S D	I 8	I 9	III 10	IV 11	SUDA H	BELU M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	II	1										
2	III	4										
3	IV	2										
4												

Nb. Data ini diambil sampai dengan Desember 2023

Sumber data : Subbagian Umum dan Aparatur Dinas Perikanan

a. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang berjumlah 60 Orang Terdiri dari : Tenaga Administrasi Perkantoran 40 Orang, Petugas Pengamanan Kantor 2 Orang, Petugas Kebersihan Kantor 2 Orang, Supir/Motoris 1 Orang, Petugas UPT BI 8 Orang, Petugas TPI 7 Orang.

Tabel 1.2
Jumlah tenaga kontrak Dinas perikanan kab. Kapuas Hulu tahun 2023.

NO	KANTOR DINAS	UPT	TPI	PETUGAS KEAMANAN - KEBERSIHAN- SUPIR	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6
1	40	8	7	5	60	
2						
3						

Nb. Data ini diambil sampai dengan Desember 2023

Sumber data : Subbagian Umum dan Aparatur Dinas Perikanan

4. Sumber Daya Keuangan

Sumber Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2023, bersumber dari dana APBD Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dan APBN melalui DAK dengan total dana sebesar Rp. Rp. 9.634.854.618 (Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sumber Dana Dinas Perikanan tahun 2023.

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	Rp3.714.565.502
	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.077.950.214
	Belanja Hibah	Rp1.808.298.902
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 34.040.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	Belanja Modal Jalan Jaringan Irigasi	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 9.500.000
	JUMLAH	Rp. 9.634.854.618

Nb. Data ini diambil sampai dengan DPPA Dinas Perikanan TH 2023

Sumber data : DPA, DPA Penyempurnaan, DPA Perubahan TH 2023

5. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan sampai dengan Tahun 2023

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	5	5			
2	Instalasi PDAM/PLN/Jaringan	8	8			
3	Bangunan					
	a. Gedung Kantor	12	12			
	b. Rumah Dinas	2	2			
	c. Rumah Tamu (Gusest House)	1	1			
	d. Mess, Pos Penyuluh Perikanan,	23	7			
	e. Kolam /Bak Ikan	21	21			
	f. Rumah Peking	1	1			
	g. Ggedung Pertemuan	2	2			
h. Tempat Pelelangan Ikan Permanen	2	2				
4	Ala/saranat Transportasi					
	a. Mobil	5	5			
	b. Sepeda Motor	32	34			
	c. Speed Boat	1	1			Rusak berat
5	Alat Perikanan					
	a. Tabung Oksigen	6	6			
	b. Tag Reader	1	1			
	c. Mesin Pencetak Pelet	2	2			
	d. Fry Counter	1	1			
	e. Mesin pencetak Pakan	2	2			
	f. Aquarium/ Wadah Benih	78	78			
	g. Pompa Air	9	9			
	h. DO Meter	3	3			
	i. pH Tester	1				
	j. pH meter	1				
k. Hyblow	13					
6	Peralatan Meubelair :					
	a. Meja kerja					
	b. Meja Rapat (Kecil/ Besar)					
	c. Meja/ Kursi Tamu					
	d. Kursi Rapat/ Kursi Kerja					
	e. Whiteboard/ Papan tulis					
f. Rak Buku Perpustakaan						

g. Lemari arsip						
NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
7	Peralatan Kantor					
	1. Komputer	3		1		
	2. Laptop, Notebook	30	15	15		
	3. Hardisk Eksternal	4				
	4. Proyektor / Infocus	5	3	2		
	5. Televisi	7				
	6. Printer	61	47		12	
	7. Alat Pendingin (AC)	16				
	8. Kipas Angin	9	3		6	
	9. Brankas	2				
	10. Felling Cabinet Besi	9				
	11. Mesin Fotocopy	2	1		1	
	12. Mesin Absensi	2				
	13. UPS	1			1	
8	ALAT-ALAT STUDIO					
	a. Kamera Digital + Asesoris					
	b. Handycam					
	c. CCTV					
	d. Solar Home System					
	e. Roll Banner					
9	ALAT UKUR					
	a. GPS	7	7			

Nb : Sumber data dari bagian Umum dan Aparatur (Aset) sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023.

2. PERENCANAAN KINERJA

A, PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIS ISSUED*)

Berbagai perkembangan kebijakan, masalah dan tantangan baru di bidang Perikanan berdampak perlunya penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2021- 2026 agar dapat menjawab perubahan dan tantangan pembangunan Perikanan, dari analisis

permasalahan yang dilakukan dapat disimpulkan isu strategis terkait Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Rendahnya pendapatan nelayan tangkap di sektor hulu;
2. Rendahnya Pendapatan Pembudidaya di sektor hulu;
3. Rendahnya pendapatan Pelaku Usaha Perikanan di sektor Hilir (Pengumpul, Distributor, Jasa Angkutan/Logistik Ikan, Pengolah/ Pedagang ikan dan Pengolah Hasil Perikanan);
4. Rendahnya kontribusi UPR/ Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat ;
5. Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas;
6. Rendahnya jaminan Ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan hanya terjangkau pada tingkat konsumen (Rumah tangga dan unit Pengolah Hasil Ikan);
7. Berkurang bahkan menghilangnya beberapa jenis ikan endemic kualitas ekspor dan atau bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan Arwana, Ringau, Belida dan lain-lain dari PUD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 s.d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Disamping itu RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perikanan saja, melainkan juga unsur Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Kapuas Hulu, dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 merupakan implementasi Rencana Strastegis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2021 – 2026, yang merupakan tolak ukur pelaporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Visi

Dengan memperhatikan arah Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di atas, maka Visi Pemerintah Kabupaten Hulu tahun 2021–2026 adalah:

TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERJIK,
BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TRAMPIL “ KAPUAS HULU HEBAT “

Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut:

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dengan adanya misi, diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui tugas, fungsi, peran, program kerja Dinas Perikanan serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Proses perumusan misi tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi serta tuntutan lingkungan.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi acuan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatkan Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial , Perlindungan perempuan dan anak . Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*).

Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada misi ke-2 berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Matrik Misi dan Tujuan RPJMD 2021 - 2026

Misi		Tujuan		Indikator	
1		2		3	
2	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan	2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, spesifik yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan Bidang-bidang yang terkait di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan tercapai maka diharapkan tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Sasaran-sasaran pembangunan 5 tahun Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan 2021 – 2026

Tujuan Dinas Perikanan		Sasaran Dinas Perikanan					
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
1		2		3		4	
1	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabel Kinerja Dinas	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perikanan			1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)
		1	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap (Ton/tahun)	1	Jumlah produksi ikan tangkap	1	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap (Ton/tahun)
		1	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya (Ton/tahun)	1	produksi budidaya	1	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya (Ton/pertahun)
		1	Meningkatnya produksi ikan olahan(Ton/tahun)	1	produksi hasil olahan ikan	1	Meningkatnya produksi ikan olahan (Ton/tahun)

Secara terinci, target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan yang akan dicapai tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 berikut

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Lainnya Dinas Perikanan T.A 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan		1. Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB	BB	A	A		
		1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	2.	Nilai Reformasi Birokrasi	25,20	25,30	25,40	25,50	26,00
				2.	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB	BB	A	A
2	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor perikanan		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)	0.90	1.05	1.12	1,23	1,35		
		1.	Meningkatnya Produksi ikan tangkap	1.	Jumlah produksi ikan tangkap (ton/tahun)	26.120	26.511	26.908	27.311	27.720
		2.	Meningkatnya Produksi ikan budidaya	1.	Jumlah produksi budidaya (ton/tahun)	25.356	25.608	25.734	25.861	25.990
		3.	Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan	1.	Jumlah produksi hasil olahan ikan (ton/tahun)	11.700	12.000	12.300	12.500	13.000

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan kinerja antara Bupati Kabupaten Kapuas Hulu selaku atasan dengan para Kepala SKPD selaku bawahan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut mengikat dan merupakan ukuran kinerja keberhasilan kepala SKPD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi masing –masing, Maka kita dapat melihat perjanjian kinerja Kepala OPD dalam tahun 2023.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala OPD Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Ton)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1. Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	25, 20
2.	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap	1. Produksi ikan tangkap dalam ton/tahun	26.503 Ton
3.	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya	1. Produksi ikan budidaya dalam ton/ tahun	30.000 Ton
4.	Meningkatnya produksi ikan olahan	1. Jumlah hasil produksi Hasil Olahan Ikan Ton/Tahun	11.700

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.581.682.068	APBD
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 891.829.200	APBD
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.939.141.250	APBD
4	Program Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan	Rp 39.281.300	APBD
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 182.920.800	APBD

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala OPD Dinas Perikanan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target (Ton)
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1.	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	25, 20
		2.	Nilai Reformasi Birokrasi	
2.	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap	1.	Produksi ikan tangkap dalam ton/tahun	26.120
3.	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya	1.	Produksi ikan budidaya dalam ton/tahun	25.482
4.	Meningkatnya produksi ikan olahan	1.	Jumlah hasil produksi Hasil Olahan Ikan Ton/Tahun	11.766

No	Program	Anggaran (Rp)		Ket
1	2	3		4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.521.650.477	APBD
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	1.823.678.432	APBD
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	3.704.308.450	APBD
4	Program Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan	Rp	49.941.250	APBD
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	688.497.247	APBD

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Penyesuaian Kepala OPD Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
			Sebelum	Sesudah	
1	2	3	5	6	
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	25, 20 (BB)	61, 40 (B)
		2	Nilai Reformasi Birokrasi		
2.	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap	1	Produksi ikan tangkap dalam ton pertahun	26.503 Ton	26.657 Ton
3.	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya	1	Produksi ikan budidaya dalam ton pertahun	30.000 Ton	30.304 Ton
4.	Meningkatnya produksi ikan olahan hasil ikan dalam jumlah dan ragam jenis	1	Jumlah hasil produksi Ikan olahan (ton per tahun)	12.000 Ton	12.395 Ton

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Penyesuaian Kepala OPD Dinas Perikanan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
			Sebelum	Sesudah	
1	2	3	5	6	
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	25, 20 (BB)	25, 20 (BB)
		2	Nilai Reformasi Birokrasi		
2.	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap	1	Produksi ikan tangkap dalam ton pertahun	25.935 Ton	25.665 Ton
3.	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya	1	Produksi ikan budidaya dalam ton pertahun	25.356 Ton	35.482 Ton
4.	Meningkatnya produksi ikan olahan hasil ikan dalam jumlah dan ragam jenis	1	Jumlah hasil produksi Ikan olahan (ton per tahun)	11.700 Ton	11.766 Ton

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Rencana}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-

indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan 29 indicator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimateoutcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya 29 indicator dan pengumpulan data serta 29 indicator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan 22 indicator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Tabel 3.2 Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran

NO	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	$70 \leq X < 85$	Berhasil
3.	$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
4.	< 55	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang 20 indikator besar didasarkan pada kelompok 20 indikator kinerja berupa 20 indikator masukan dan keluaran. Sebagian lagi berupa 20 indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan 20 indikator manfaat, dan dampak 20 indikator baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat 20 indikator pengukuran kinerja di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing 29 indicator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formuli Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian 29 indicator kinerja pada level sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target (Ton)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas perikanan	1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	B	B
2.	Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap	1	Produksi Ikan Tangkap dalam (Ton Pertahun)	26.120	26.657.	1, 02
3.	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya	1	Jumlah Produksi Budidaya (Ton Pertahun)	30.000	30.304	1, 01
4.	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan hasil Ikan dalam Jumlah dan ragam Jenis	1	Jumlah Hasil Produksi Ikan Olahan (Ton Pertahun)	12.000	12.395	1, 03
Rata – rata Capaian Kinerja						5, 51

Dari 4 sasaran Pejanjian Kinerja Tahun 2023 sebanyak 4 (empat) sasaran dalam kategori Sangat Berhasil.

Pencapaian kinerja 29 indicator sasaran dari 4 sasaran dan 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Indikator sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	2	3	4
1.	Sangat Berhasil	3	100%
2.	Berhasil	-	-
3.	Cukup Berhasil	-	-
4.	Tidak Berhasil	-	-

1. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas perikanan. Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Inspektorat atas Akuntabilitas kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan nilai sebesar 61,40 dengan predikat “B” predikat tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Akuntabilitas Kinerja ‘BAIK’ yaitu Implementasi Akip sudah baik pada perangkat daerah, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Nilai Evaluasi Tahun 2023 “TIDAK DIPERBANDINGKAN” Hal ini berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilainannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada Implementasi akuntabilitas kinerja di perangkat Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut maka metode penilaiannya akan berbeda sehingga hasilnya juga akan berbeda. Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Capaian Kinerja sasaran “*meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan*” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
 Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	Predikat	BB	B	B
TIDAK DIPERBANDINGKAN					

Dengan perubahan metode penilaian, maka TIDAK DIPERBANDINGKAN

Tabel 3.5
 Analisis Pencapaian Sasaran dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator or Kinerja	2019			2020			2021			2022			2023		
	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nilai Evaluasi Akunta bilitas Kinerja	BB	B	98, 34	B	B	100	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	B	B

Tabel 4.1 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
 Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	B	TIDAK DIPERBANDINGKAN

Target Penyelenggara SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat . Realisasi kinerja Tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat “BB” dengan capaian kinerja sebesar 100 % Realisasi kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang mendapat predikat “**B**” Jika dibandingkan Tahun 2022, maka predikat SAKIP Dinas Perikanan mengalami perubahan Penilaian metodenya peningkatan kinerja dari capaian sebelumnya yaitu “**BB**”. Hal ini berakibat pada indikator Nilai

(skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 yang TIDAK DIPERBANDINGKAN.

Realisasi kinerja Tahun 2023 yang mendapat predikat “**B**” jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Perikanan 2021 - 2026 dengan predikat “**A**”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah belum mencapai mencapai 100% walaupun metodenya berbeda tapi secara penilaian Sudah “ **BAIK** “ indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan merupakan bentuk tanggung jawab OPD Dinas Perikanan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD “ **BAIK** “ adalah :

1. Pelaksanaan reviu Rencana Strategis RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dan Renja OPD tahun 2023;
2. Inten melakukan koordinasi dengan OPD terkait yang membindangi dokumen perencanaan dan SAKIP seperti Inspektorat, (Ortal) dan (Bappeda) dalam rangka review, revisi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap dokumen dan perencanaan dan evaluasi SAKIP;
3. Penyusunan Cascading, Rencana Aksi serta Rencana Kerja Tahunan Bidang masing - masing;
4. Melakukan evaluasi internal secara berkala yakni tiga bulan sekali serta melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja;
5. Melakukan Inovasi peningkatan Kinerja pada Dinas Perikanan.

Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan tentunya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis meliputi Renstra, Rencana Kerja, Cascading dan Rencana Aksi Dinas Perikanan;
2. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah belum berorientasi hasil (Outcome);

3. Cascading kinerja yang merupakan kinerja turunan dari pejabat di atasnya belum sinkron dengan kegiatan yang dilakukan;
4. Masih kurangnya data dan informasi pendukung sebagai dasar penyusunan pelaporan kinerja serta tindak lanjut permasalahan yang dilaporkan;
5. Masih terdapatnya kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menargetkan predikat SAKIP yaitu sesuai dengan predikat tahun sebelumnya yaitu BB. Agar dalam pelaksanaannya mengalami peningkatan kualitas maka Dinas Perikanan mencantumkan beberapa rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan predikat sakip yaitu :

1. Membuat jadwal dan SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik ;
2. Dalam monitoring rencana aksi agar
 - Menambahkan pembahasan pencapaian target pada IKU
3. Menetapkan target yang direncanakan secara periodik
4. Mengukur realisasi secara berkala
 - Membuat analisis dan alternatif solusi terhadap pencapaian target
 - Memanfaatkan sepenuhnya dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
5. Dalam pengukuran perjanjian kinerja dengan membuat kesimpulan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian target kinerja;
6. Membuat peraturan kepala dinas tentang reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) terhadap kinerja pegawai.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas perikanan adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - f) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan:
 - a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan:
 - a) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b) Penataan Usaha Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah Perangkat Daerah Sub Kegiatan:
 - c) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan:
 - d) Pendapatan dan Pengelolaan Administrasi Administrasi Kepegawaian
 - e) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran 2 : Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap

Sasaran “*Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap*” bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Kapuas Hulu. cara mengukur produksi Ikan Tangkap dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :

Jumlah Hasil Tangkapan Nelayan (Jaring Insang Hanyut + Jaring Insang Tetap+ Serok + Anco + Rawai + Pancing +Serok + Jermal + Bubu +Jala Tebar + Pukat Labuh)

Untuk mengukur “Meningkatkan Produksi Ikan Tangkap *maka* dilakukan survey oleh Numerator, Pengolah data, Validator dan buckp up Validator Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Metode tersebut dilakukan dengan survei, wawancara atau observasi kepada Nelayan berdasarkan alat tangkap yang di Perairan Umum Daratan, atau dengan cara menambah jumlah pembudidaya yang di jadikan dasar menghitung. Jaring Insang Hanyut, Jaring Insang Tetap, Serok, Anco, Rawai, Pancing, Serok , Jermal, Bubu, Jala Tebar, dan Pukat Labuh, adalah nama alat Tangkap yang digunakan oleh Nelayan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan hasil produksi tangkap tahun 2023

Tabel: 4.2 PRODUKSI Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan Tahun 2023

No	Alat tangkap	Jenis Ikan		Kecamatan													
				selimbau	suhaid	jongkong	bunut hilir	embaloh hilir	bika	batang lupar	badau	semitau	silat hilir	Pts.Utara	Pts.Selatan	embaloh hulu	Total (Kg)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jaring Insang Hanyut	1	Jelawat	33.050	19.529	18.027	20.701	12.018	6.759	15.442	8.594	4.838	3.667	2.585	1.502	3.514	150.227
		2	Lais	9.136	5.399	4.983	5.716	3.322	1.869	4.262	2.382	1.344	1.027	721	415	951	41.528
		3	Kelabau	15.395	9.097	8.397	9.591	5.598	3.149	7.141	4.055	2.305	1.811	1.256	700	1.482	69.975
		4	Tengadak	40.921	24.181	22.321	25.494	14.880	8.369	18.983	10.778	6.127	4.815	3.338	1.860	3.939	186.005
		5	Patik	55.331	32.695	30.180	34.471	20.120	11.316	25.667	14.573	8.284	6.510	4.513	2.515	5.326	251.503
		6	Entukan	160.024	94.559	87.286	100.050	58.190	32.728	74.588	41.793	23.604	18.117	12.697	7.274	16.469	727.380
		7	Tambakan	56.036	33.112	30.565	35.165	20.377	11.461	26.249	14.505	8.136	6.084	4.316	2.547	6.158	254.711
		8	Seluang	48.793	28.832	26.614	30.781	17.743	9.979	23.018	12.468	6.922	4.974	3.596	2.218	5.847	221.785
		9	Lampan	48.395	28.597	26.397	30.370	17.598	9.898	22.670	12.527	7.026	5.254	3.728	2.200	5.318	219.977
		10	Ikan Umpan	94.884	56.068	51.755	59.047	34.503	19.406	43.950	25.057	14.272	11.296	7.805	4.313	8.935	431.291
2	Jaring Insang Tetap	1	Lais	21.520	12.717	11.738	13.407	7.826	4.401	9.983	5.668	3.222	2.532	1.755	978	2.071	97.820
		2	Gabus	15.760	9.313	8.596	9.819	5.731	3.223	7.311	4.151	2.360	1.854	1.285	716	1.517	71.637
		3	Tambakan	18.219	10.766	9.938	11.359	6.625	3.726	8.460	4.790	2.719	2.127	1.478	828	1.779	82.816
		4	Bauk	14.190	8.385	7.740	8.847	5.160	2.902	6.589	3.731	2.118	1.656	1.151	645	1.386	64.502
		5	Patik	22.834	13.493	12.455	14.236	8.303	4.670	10.603	6.004	3.408	2.666	1.852	1.038	2.230	103.793
		6	Entukan	31.653	18.704	17.265	19.774	11.510	6.474	14.738	8.282	4.685	3.615	2.527	1.439	3.210	143.875
		7	Seluang	13.409	7.924	7.314	8.360	4.876	2.742	6.227	3.526	2.001	1.565	1.088	610	1.309	60.951
3	Rawai	1	Baung	26.793	15.832	14.614	16.907	9.743	5.480	12.644	6.841	3.796	2.721	1.970	1.218	3.225	121.785
		2	Gabus	17.104	10.107	9.329	10.660	6.220	3.498	7.938	4.501	2.557	2.004	1.391	777	1.658	77.744
		3	Toman	85.900	50.759	46.854	53.270	31.236	17.568	39.602	22.871	13.107	10.599	7.253	3.905	7.529	390.452
		4	Tapah	21.231	12.545	11.580	13.202	7.720	4.342	9.824	5.616	3.203	2.547	1.756	965	1.970	96.503
4	Bubu	1	Baung	547.983	323.808	298.900	342.427	199.267	112.075	255.235	143.298	81.015	62.409	43.665	24.908	55.843	2.490.833
		2	Belida	18.844	11.135	10.278	11.834	6.852	3.854	8.835	4.869	2.727	2.029	1.443	857	2.096	85.654
		3	Gabus	203.002	119.956	110.728	126.345	73.819	41.519	94.044	53.594	30.520	24.137	16.684	9.227	19.161	922.737
		4	Gurame	1.718	1.015	937	1.068	625	351	795	454	259	206	142	78	159	7.807
		5	Jelawat	65.320	38.598	35.629	41.189	23.753	13.359	30.795	16.710	9.286	6.696	4.834	2.969	7.771	296.908
		6	Lais	494.367	292.126	269.655	311.469	179.770	101.110	232.809	126.731	70.542	51.206	36.846	22.471	58.022	2.247.124

		7	Lele	61	36	33	38	22	13	28	16	9	7	5	3	6	279
		8	Tambakan	554.808	327.841	302.622	350.066	201.748	113.471	261.789	141.708	78.649	56.431	40.834	25.219	66.668	2.521.853
		9	Toman	233.152	137.772	127.174	145.680	84.783	47.685	108.583	60.983	34.483	26.580	18.591	10.598	23.720	1.059.784
		10	Patik	100.048	59.119	54.572	62.214	36.381	20.462	46.295	26.467	15.096	12.004	8.277	4.548	9.282	454.764
		11	Ikan Umpan	1.232.424	728.251	672.231	765.268	448.154	252.058	569.172	327.137	187.060	150.083	103.060	56.019	111.011	5.601.929
		12	Bauk	104.006	61.458	56.731	64.676	37.821	21.272	48.127	27.514	15.693	12.479	8.604	4.728	9.649	472.757
		13	Seluang	605.777	357.959	330.424	377.667	220.283	123.895	281.279	159.286	90.434	70.743	49.145	27.535	59.106	2.753.532
		14	Tapah	21.996	12.998	11.998	13.719	7.998	4.499	10.219	5.778	3.277	2.556	1.778	1.000	2.165	99.981
		15	Entukan	114.745	67.804	62.588	72.059	41.726	23.468	53.801	29.650	16.608	12.355	8.787	5.216	12.762	521.570
		16	Lampan	103.709	61.283	56.569	65.128	37.712	21.211	48.627	26.798	15.011	11.167	7.942	4.714	11.535	471.405
		17	Patin	37.687	22.270	20.557	23.667	13.704	7.708	17.671	9.738	5.455	4.058	2.886	1.713	4.192	171.306
		18	bilis	33.109	19.565	18.060	20.589	12.040	6.772	15.321	8.759	4.996	3.973	2.739	1.505	3.072	150.498
		19	tengadak	63.465	37.502	34.617	39.465	23.078	12.980	29.367	16.789	9.576	7.615	5.250	2.885	5.888	288.476
5	Jala Tebar	1	Baung	85.997	50.817	46.908	54.076	31.272	17.588	40.393	22.151	12.377	9.119	6.515	3.909	9.776	390.897
		2	Gabus	817	483	446	513	297	167	383	211	118	88	63	37	91	3.713
		3	Jelawat	16.093	9.510	8.778	10.107	5.852	3.291	7.546	4.158	2.329	1.733	1.232	732	1.790	73.152
		4	Lais	65.722	38.836	35.848	41.277	23.899	13.442	30.820	16.978	9.508	7.068	5.028	2.987	7.323	298.736
		5	Tambakan	79.695	47.092	43.470	50.359	28.980	16.299	37.679	20.281	11.223	7.957	5.791	3.622	9.799	362.249
		6	Toman	5.728	3.385	3.124	3.531	2.083	1.172	2.620	1.545	895	749	504	260	438	26.036
		7	Entukan	98.915	58.450	53.954	61.569	35.969	20.230	45.830	26.108	14.866	11.750	8.124	4.496	9.354	449.613
		8	Lampan	34.886	20.615	19.029	21.908	12.686	7.135	16.357	9.014	5.049	3.756	2.672	1.586	3.880	158.574
		9	Ikan Umpan	2.041	1.206	1.113	1.282	742	417	957	527	295	220	156	93	227	9.276
		10	Seluang	36.037	21.294	19.656	22.620	13.104	7.370	16.886	9.322	5.226	3.901	2.770	1.638	3.977	163.803
		11	Tengadak	36.972	21.847	20.166	22.979	13.444	7.579	17.114	9.774	5.590	4.458	3.052	1.681	3.397	168.053
6	Pukat labuh	1	Bandeng	1.782	1.053	972	1.119	648	365	836	461	258	192	136	81	198	8.101
		2	Baung Putih	1.336	790	729	839	486	273	627	345	193	144	102	61	149	6.074
		3	Jelawat	891	526	486	560	324	182	418	230	129	96	68	40	99	4.050
		4	Lais	2.970	1.755	1.620	1.865	1.080	608	1.393	768	430	320	227	135	330	13.502
		5	Lampan	2.673	1.580	1.458	1.679	972	547	1.253	691	387	288	205	122	297	12.152
		6	Tambakan	5.198	3.071	2.835	3.264	1.890	1.063	2.437	1.343	752	560	398	236	578	23.627
		JUMLAH		5.864.554	3.465.418	3.198.847	3.665.342	2.132.565	1.199.454	2.732.231	1.532.899	866.358	666.574	466.617	266.571	599.632	26.657.062

Sumber data : Bidang Perikanan Tangkap

Tabel: 4.3 PRODUKSI Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan Tahun 2022

No.	Alat tangkap	Jenis Ikan		Kecamatan													
				selimbau	suhaid	jongkong	bunut hilir	embaloh hilir	bika	batang lupar	badau	semitau	silat hilir	Pts.Utara	Pts.Selatan	embaloh hulu	Total
1	Jaring Insang Hanyut	1	Jelawat	31.648	18.701	17.263	19.873	11.508	6.492	14.857	8.160	4.582	3.543	2.406	1.439	3.383	143.855
		2	Lais	8.775	5.185	4.786	5.505	3.191	1.797	4.111	2.270	1.276	996	675	399	920	39.885
		3	Kelabau	14.938	8.827	8.148	9.340	5.432	3.043	6.952	3.912	2.203	1.772	1.196	679	1.457	67.900
		4	Tengadak	39.707	23.463	21.658	24.828	14.439	8.089	18.478	10.400	5.855	4.711	3.180	1.805	3.873	180.487
		5	Patik	53.689	31.726	29.285	33.571	19.523	10.938	24.985	14.062	7.917	6.370	4.300	2.440	5.237	244.043
		6	Entukan	153.927	90.957	83.960	96.517	55.974	31.501	72.044	39.903	22.426	17.584	11.916	6.997	15.963	699.669
		7	Tambakan	53.407	31.558	29.131	33.588	19.421	10.982	25.149	13.692	7.681	5.850	3.981	2.428	5.889	242.757
		8	Seluang	45.888	27.115	25.030	28.985	16.686	9.502	21.800	11.572	6.474	4.713	3.229	2.086	5.500	208.581
		9	Lampau	46.124	27.255	25.158	29.008	16.772	9.484	21.720	11.825	6.633	5.053	3.439	2.097	5.086	209.653
		10	Ikan Umpan	92.320	54.553	50.357	57.675	33.571	18.781	42.885	24.257	13.663	11.078	7.471	4.196	8.829	419.638
2	Jaring Insang Tetap	1	Baung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Lais	20.882	12.339	11.390	13.057	7.593	4.254	9.718	5.469	3.079	2.477	1.673	949	2.037	94.918
		3	Gabus	15.293	9.037	8.341	9.562	5.561	3.115	7.117	4.005	2.255	1.814	1.225	695	1.492	69.512
		4	Tambakan	17.647	10.428	9.626	11.041	6.417	3.598	8.222	4.612	2.596	2.078	1.404	802	1.744	80.214
		5	Bauk	13.745	8.122	7.497	8.599	4.998	2.803	6.404	3.592	2.022	1.618	1.093	625	1.358	62.475
		6	Patik	22.117	13.069	12.064	13.837	8.043	4.510	10.305	5.780	3.253	2.604	1.759	1.005	2.186	100.532
		7	Entukan	30.507	18.027	16.640	19.116	11.093	6.237	14.260	7.927	4.457	3.515	2.380	1.387	3.121	138.666
		8	Seluang	12.988	7.675	7.084	8.126	4.723	2.648	6.051	3.395	1.910	1.529	1.033	590	1.283	59.036
3	Rawai	1	Baung	25.179	14.878	13.734	15.908	9.156	5.216	11.968	6.344	3.548	2.576	1.766	1.144	3.031	114.449
		2	Gabus	16.581	9.798	9.044	10.371	6.030	3.380	7.721	4.338	2.442	1.960	1.323	754	1.628	75.370
		3	Toman	84.288	49.806	45.975	52.515	30.650	17.073	38.938	22.363	12.617	10.469	7.038	3.831	7.564	383.126
		4	Tapah	20.695	12.229	11.288	12.921	7.525	4.206	9.602	5.449	3.070	2.502	1.686	941	1.953	94.067

		1	Baung	527.806	311.885	287.894	330.810	191.929	107.939	246.820	137.039	77.040	60.649	41.074	23.991	54.240	2.399.118
		2	Belida	17.928	10.594	9.779	11.281	6.519	3.690	8.452	4.586	2.572	1.948	1.327	815	2.000	81.489
		3	Gabus	197.461	116.681	107.706	123.371	71.804	40.177	91.743	51.865	29.213	23.667	15.963	8.975	18.924	897.549
		4	Gurame	1.674	989	913	1.045	609	340	777	441	248	202	136	76	158	7.610
		5	Jelawat	61.503	36.342	33.547	38.833	22.365	12.728	29.196	15.533	8.692	6.353	4.351	2.796	7.319	279.557
		6	Lais	466.480	275.647	254.443	294.331	169.629	96.426	221.127	118.130	66.131	48.707	33.316	21.204	54.791	2.120.362
		7	Lele	60	35	33	37	22	12	28	16	9	7	5	3	6	272
		8	Tambakan	521.544	308.185	284.479	329.480	189.652	108.021	247.849	131.456	73.531	53.442	36.630	23.707	62.679	2.370.656
		9	Toman	224.618	132.729	122.519	140.772	81.679	45.930	105.023	58.335	32.796	25.836	17.496	10.210	23.047	1.020.993
		10	Patik	97.522	57.627	53.194	60.889	35.463	19.821	45.248	25.678	14.469	11.791	7.946	4.433	9.203	443.283
		11	Ikan Umpan	1.205.520	712.353	657.556	751.842	438.371	244.575	558.046	318.696	179.697	147.861	99.511	54.796	110.813	5.479.637
		12	Bauk	101.381	59.907	55.299	63.298	36.866	20.605	47.038	26.694	15.041	12.258	8.261	4.608	9.567	460.821
		13	Seluang	586.800	346.745	320.072	367.112	213.382	119.651	273.381	153.382	86.324	69.110	46.691	26.673	57.948	2.667.271
		14	Tapah	21.283	12.577	11.609	13.320	7.739	4.342	9.923	5.556	3.126	2.495	1.686	967	2.118	96.742
		15	Entukan	109.166	64.507	59.545	68.695	39.697	22.469	51.467	27.926	15.660	11.859	8.078	4.962	12.177	496.208
		16	Lampau	98.666	58.303	53.818	62.088	35.879	20.308	46.517	25.240	14.154	10.719	7.301	4.485	11.006	448.483
		17	Patin	35.855	21.187	19.557	22.562	13.038	7.380	16.904	9.172	5.144	3.895	2.653	1.630	3.999	162.976
		18	bilis	32.274	19.071	17.604	20.150	11.736	6.559	14.974	8.498	4.788	3.902	2.630	1.467	3.045	146.698
		19	tengadak	61.862	36.555	33.743	38.625	22.495	12.573	28.702	16.288	9.178	7.480	5.041	2.812	5.838	281.193
4	Jala Tebar	1	Baung	81.547	48.187	44.480	51.370	29.654	16.813	38.530	20.777	11.643	8.722	5.950	3.707	9.288	370.670
		2	Gabus	777	459	424	489	283	160	366	199	111	84	57	35	87	3.532
		3	Jelawat	15.311	9.047	8.351	9.635	5.568	3.151	7.218	3.917	2.196	1.663	1.133	696	1.708	69.595
		4	Lais	62.509	36.937	34.096	39.339	22.731	12.868	29.476	15.985	8.964	6.782	4.620	2.841	6.985	284.131
		5	Tambakan	74.634	44.102	40.710	47.208	27.140	15.489	35.557	18.723	10.464	7.502	5.153	3.392	9.174	339.247
		6	Toman	5.741	3.392	3.131	3.561	2.087	1.155	2.628	1.547	875	752	503	261	461	26.094
		7	Entukan	94.278	56.841	52.469	60.104	34.979	19.574	44.699	25.259	14.227	11.518	7.769	4.372	9.234	435.326
		8	Lampau	33.190	19.612	18.104	20.885	12.069	6.831	15.648	8.490	4.761	3.606	2.456	1.509	3.702	150.863
		9	Ikan Umpan	1.942	1.147	1.059	1.222	706	400	915	497	279	211	144	88	217	8.825
		10	Seluang	34.323	20.282	18.722	21.591	12.481	7.060	16.170	8.792	4.932	3.749	2.552	1.560	3.801	156.014
		11	Tengadak	36.784	21.736	20.064	22.967	13.376	7.476	17.067	9.685	5.457	4.448	2.997	1.672	3.471	167.200
5	Pukat labuh	1	Bandeng	1.696	1.002	925	1.067	617	349	799	434	243	184	125	77	189	7.707
		2	Baung Putih	1.271	751	693	800	462	262	599	325	182	138	94	58	142	5.779

	3	Jelawat	848	501	462	533	308	174	337	217	122	92	63	102	95	3.853
	4	Lais	2.826	1.670	1.541	1.778	1.028	582	1.332	723	405	307	209	128	315	12.845
	5	Lampan	2.543	1.503	1.387	1.601	925	523	1.199	651	365	276	188	116	284	11.561
	6	Tambakan	4.945	2.922	2.697	3.112	1.798	1.018	2.331	1.265	709	537	366	225	552	22.478
JUMLAH			5.646.825	3.336.760	3.080.086	3.539.747	2.053.391	1.155.081	2.641.437	1.465.345	823.709	647.565	438.649	256.674	582.117	25.665.470

Jika kita lihat table produksi perikanan Tangkap/Perairan Umum Daratan, maka kita akan melihat peningkatan jumlah produksinya, tahun 2022 hasil produksi perikanan Tangkap adalah: 25.665.470/ 25.665 Juta Ton sedangkan pada tahun 2023 produksi tangkap perairan Umum Daratan adalah : 26.657.062/ 26.657 Juta Ton ada kenaikan Produksi sebesar 992 ribu Kg Sehingga jika kita lihat pada tahun 2023 Dinas Perikanan berhasil meningkatkan produksinya.

Tabel 4.4 Produksi 3 besar Alat tangkap

No	Nama Alat Tangkap	Jenis Ikan	Hasil Tangkapan (Kg)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jaring Insang Hanyut	Entukan Ikan Umpan Tambakan	727.380 431.291 254.711	Entukan
2	Jaring Insang Tetap	Entukan Patik Lais	143.875 103.793 97.820	Entukan
3	Rawai	Toman Baung Tapah	390.452 121.785 96.505	Toman
4	Bubu	Ikan Umpan Ikan Seluang Tambakan	5.601.929 2.753.532 2.521.853	Ikan Umpan
5	Jala Tebar	Entukan Tambakan Lais	449.613 362.249 298.736	Entukan
6	Pukat labuh	Tambakan Lais Lampun	23.627 13.502 12.152	Tambakan

Selimbau hampir mendominasi semua alat tangka, hal ini karena Kecamatan Selimbau berada di wilayah Danau Sentarum yang penduduknya bermata pencairan sebagai nelayan, sedangkan Kecamatan yang lain berada pada Daerah penyangga, Danau Sentarum juga menyimpan berbagai jenis ikan endemik asli Kapuas hulu.

Permasalahan perairan Umum Daratan (PUD) adalah

1. Faktor alam saat musim hujan sering terjadi banjir;

2. Sebagian nelayan beralih usaha dari nelayan utama ke nelayan sambilan (petani kratom dan pekerjaan lainnya) dikarenakan lebih menguntungkan;
3. Ketika Musim kemarau ikan melimpah sulit untuk memasarkan dan harga ikan menjadi turun.
4. Terjadi pedangkalan pada tempat berlindung ikan (Lubuk Ikan).
5. Masih ditemukan aktifitas penangkapan ikan dengan bahan dan alat dan atau cara yang dilarang/ membahaya aktivitas perairan (destructive fishing).
6. Degradasi Lingkungan
7. Minimnya Sumber Daya Manusia pada Nelayan Kecil dalam pengelolaan Kawasan konservasi maupun pengelolaan sumber daya ikan sehingga harus selalu dilakukan pembinaan baik kekompakan kepengurusan maupun pengelolaan Kawasan danau secara berkelanjutan
8. Pendataan kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) sangat diperlukan sebagai kartu identitas pelaku usaha perikanan dan merupakan upaya pemerintah dalam rangka untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran namun karena anggaran untuk pendataan minim maka tidak semua desa nelayan bisa diakomodir untuk pendataannya.
9. Hasil tangkapan Nelayan menurun disebabkan Pengaruh alam (Banjir) sehingga trip dalam mencari ikan berkurang dan minimnya anggaran dalam Pengambilan data statistik perikanan tangkap.
10. Perlu adanya penambahan jumlah benih ikan hias maupun ikan konsumsi untuk di Restocking di Danau sebagai bentuk penambahan stock ikan.
11. Kegagalan Panen ikan konsumsi tergantung keadaan cuaca dan musim.
12. Rendahnya harga ikan hasil panen

13. Tidak adanya penampung ikan untuk hasil panen, sehingga ikan yang dipanen hanya sesuai kebutuhan saja.
14. Saat Melaksanakan Pendistribusian waktunya terlalu berdekatan dengan waktu habis kontrak;
15. Belanja barang secara E-catalog Nasional.
16. Minimnya SDM nelayan dalam pengelolaan penataan kampung nelayan maju sehingga agak menghambat pada proses kegiatan
17. Padatnya populasi, belum optimalnya fasilitas umum serta kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan Desa nelayan menjadi kumuh.
18. Perlu adanya bengkel khusus mesin tempel / Perahu Fiber bagi nelayan kecil di perairan daratan (Desa dengan basis Nelayan).
19. Minimnya tenaga ahli (teknisi) sesuai standar serta anggaran pada kegiatan pelatihan tersebut.
20. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan pelatihan terutama untuk peserta dan narasumber
21. Kurangnya minat peserta yang dilatih untuk melanjutkan ilmu yang sudah didapat
22. Minimnya sarana prasana bagi peserta pelatihan.
23. Minimnya informasi tentang Kelompok Usaha Bersama bagi nelayan kecil terutama yang akan membentuk KUB baru, sehingga tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis.
24. Minimnya informasi tentang KUB berbadan Hukum
25. Minimnya sarana komunikasi sebagai media informasi untuk kegiatan kenelayanan.
26. Anggaran Kegiatan Asuransi Nelayan dialihkan ke Kegiatan Bakti Nelayan sehingga pendataan nelayan dan pendistribusian kartu asuransi nelayan tidak bisa dilaksanakan
27. Masih ada pelaku usaha perikanan (Pengumpul ikan) yang tidak melakukan transaksi di TPI.
28. Minimnya sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan (TPI) terutama TPI Putussibau.
29. Masih banyak Pengumpul ikan yang tidak mentaati aturan
30. Minimnya sarpras pada TPI Putussibau

31. Luasnya Perairan Daratan Kabupaten Kapuas Hulu berakibat tidak semua wilayah bisa terawasi.
32. Minimnya Operasional Pengawasan menyebabkan kegiatan Pengawasan Lapangan hanya dilakukan di beberapa titik perairan daratan.
33. Terbatasnya sarana yang digunakan untuk kegiatan pengawasan seperti mesin tempel yang kurang memadai dibandingkan dengan pelaku, alat komunikasi yang belum ada (HT) untuk memudahkan komunikasi saat menangkap pelaku
34. Terbatasnya sarana yang digunakan untuk kegiatan pengawasan seperti mesin tempel yang kurang memadai dibandingkan dengan pelaku, alat komunikasi yang belum ada (HT) untuk memudahkan komunikasi saat menangkap pelaku.
35. Minimnya Anggaran Operasional bagi Pokmaswas dalam rangka patroli pengawasan di Perairan baik sungai maupun danau di Kabupaten Kapuas Hulu.
36. Masih ditemukannya masyarakat yang membudidayakan ikan invasif di keramba, salah satu nya ikan bawal
37. Masih ditemukannya ikan arwana brazil , ikan nila yang dipelihara dikeramba sungai Kapuas.

Tindak lanjut yang bidang telah lakukan adalah:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Memberikan Edukasi dan sosialisasi tentang Pengelolaan SDI yang berkelanjutan.
3. Restocking;
4. Meningkatkan pengawasan pada wilayah perairan umum daratan dengan melibatkan peran serta Pokmaswas;
5. Melakukan Pembinaan kepada kepengurusan danau baik pengelolaan Kawasan konservasi maupun pengelolaan sumber

daya ikannya secara berkesinambungan,berkelanjutan dan terus menerus.

6. Melakukan Pendataan kusuka ke Desa Nelayan yang menjadi target pendataan.
7. Membagi beberapa Desa sample sebagai titik target yang harus dipenuhi
8. Mealokasikan anggaran untuk restocking ikan konsumsi dan ikan Endemik
9. Melakukaan Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak dan Asosiasi Penangkar dan Pedagang Silok (APPS) Kalbar Untuk Kegiatan Restocking.
10. Memberikan arahan kepada kepengurusan danau lindung untuk melaksanakan panen ikan sesuai dengan prosedur yang ada..seperti keadaan cuaca,persiapan pasca panen dan sebagainya.
11. Biasanya Pengurus Danau Lindung sebelum panen melakukan pendataan untuk pembeli ikan,sehingga hasil panen kurang maksimal karena sesuai kebutuhan dan jumlah pembeli atau pengumpul ikan.
12. Melaksanakan pendistribusian diusahakan sebelum masa waktu kontrak.
13. Malakukan Koordinasi dengan Penyedia agar pendistribusian barang bisa tepat waktu dan tidak melewati batas waktu kontrak kerja.
14. Mendampingi pengurus KALAJU dalam hal ini (Penyuluh perikanan) untuk membantu pada proses kegiatan kampung nelayan maju (SwakelolaTipe 4).
15. Berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang program kegiatan KALAJU selanjutnya.
16. Tersedianya Tenaga Ahli dalam perbaikan mesin tempel dan perahu fiber.
17. Perlu adanya tambahan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan nelayan kecil

18. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta yang sudah dilatih untuk dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapat.
19. Membantu memberikan arahan dalam pembentukan Kelompok Usaha Bersama sesuai keputusan Menteri KKP RI Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
20. Mendampingi kelompok usaha Bersama dalam proses KUB berbadan Hukum.
21. Melakukan Pembinaan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas, aktualisasi dan kualitas diri untuk bisa mandiri dan bermakna.
22. Melakukan Koordinasi Kembali dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI) Dirjen Perikanan Tangkap Direktorat Kenelayanan dan Perizinan.
23. Melakukan Pembinaan Kepada Petugas TPI;
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi dilapangan;
25. Melakukan pendekatan kepada pelaku perikanan supaya mau melakukan transaksi/bongkar muat di TPI serta membayar retribusi.
26. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Petugas TPI dan Pelaku usaha Perikanan tentang Perda dan Perbub tentang Retribusi TPI.
27. Meningkatkan kinerja petugas TPI dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di tempat pelelangan ikan.
28. Menentukan titik perairan yang menjadi target pengawasan.
29. Perlu adanya anggaran untuk kegiatan pengawasan.
30. Perlu adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan kepada POKMASWAS seperti mesin tempel yang berukuran besar dan alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie)
31. Perlu adanya pertemuan Teknis POKMASWAS Tingkat Kabupaten sebagai salah satu pembinaan berkelanjutan.

32. Perlu diadakan lomba POKMASWAS sebagai bentuk Motivasi dan Reward bagi Pengurus POKMASWAS atas peran sertanya menjaga perairan Kapuas Hulu.
33. Perlu adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan kepada POKMASWAS seperti mesin tempel yang berukuran besar dan alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie).
34. Perlu dilakukan Pembinaan seperti pertemuan teknis POKMASWAS tingkat Kabupaten.
35. Perlu dilakukan lomba POKMASWAS Tk.Kabupaten sebagai bentuk reward atas partisipasi perasn serta POKMASWAS dalam Menjaga perairan daratan di Kabupaten Kapuas Hulu.
36. Melakukan sosialisasi kontrol budidaya ikan invasif yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak buruk yang terjadi apabila ikan invasif ini lepas liar ke perairan sungai dan danau.

Tabel 4.5

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan produksi ikan tangkap 2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan produksi ikan tangkap	Ton	26.511	26.657	100, 6
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (100,6 %)					

Tabel 5.1 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Produksi Ikan Tangkap Ton per tahun	27.720	26.657	96, 17

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap Tahun 2023 sebesar 100, 6 % dikategorikan “Sangat berhasil”. Realisasi kinerja Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap Tahun 2023 sebesar 100, 6 % Sangat baik.

Realisasi kinerja tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 26.511 Ton.

Realisasi kinerja Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap tahun 2023 sebesar 26.657 ton jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 25.665 ton, maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan produksi sebesar 992 Kg.

Realisasi kinerja indikator Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap tahun 2023 sebesar 26.657 ton jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 27.720 ton maka tingkat kemajuan indikator Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap tahun 2023 mencapai 96,17 %.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap tahun 2023 adalah :

1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
4. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
5. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
6. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
7. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Sasaran 3 :Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya

Sasaran "*Meningkatnya Produksi Budidaya*" bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan pembudidaya. Adapun cara mengukur Produksi budidaya adalah dengan melakukan survei, wawancara atau observasi dan dokumentasi terhadap Produksi Perikanan Budidaya yang terdiri dari budidaya dikeramba, budidaya dikolam, budidaya minapadi yang ada di Kapuas Hulu, dengan rumus:

Jumlah Produksi = keramba + Kolam +Minapadi

Untuk mengukur “Meningkatnya Produksi Pembudidaya”, maka dilakukan survey yang dilakukan oleh enumerator, pengolah data, Validator dan Buckup Validator bidang, yang menangani data produksi bidang perikanan budidaya. Data tersebut berupa data pembudidaya baik **keramba, kolam dan Minapadi**. Metode yang digunakan adalah: Metode sampel dan wawancara pada lokasi Kecamatan yang potensi produksinya tinggi dan hasil laporan dari Kepala desa/Sekdes. Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 total produksinya adalah 30.304.000 Kg atau 30.304 Ton melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30.000 Ton, bila dibandingkan dengan produksi tahun 2022 maka produksi tahun 2023 mengalami penurunan produksi.

Tabel 5.2 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023											
NO	KECAMATAN	JENIS BUDIDAYA								MINA PADI	JUMLAH
		KOLAM				KERAMBA					
		NILA (Kg)	LELE (Kg)	BAWAL AIR TAWAR (Kg)	PATIN (Kg)	BAUNG (Kg)	JELAWAT (Kg)	PATIN (Kg)	TOMAN (Kg)	NILA (Kg)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SILAT HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SILAT HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	HULU GURUNG	1.765.454	-	368.096	-	-	-	-	-	-	1200
4	BUNUT HULU	87.346	-	-	25.982	-	-	-	-	-	-
5	MENTEBAH	151.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BIKA	-	-	-	326.206	-	-	-	-	-	-
7	KALIS	80.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PUTUSSIBAU SELATAN	-	470.536	-	1.220.688	-	-	-	-	-	-
9	EMBALOH HILIR	-	-	-	-	98.620	31.000	470.991	487.780	-	-
10	BUNUT HILIR	-	-	-	-	1.167.332	23.048	83.720	1.717.086	-	-
11	BOYAN TANJUNG	112.108	-	-	165.822	-	-	-	-	-	-
12	PENGKADAN	278.846	-	306.033	-	-	-	-	-	-	-
13	JONGKONG	-	-	-	320.000	99.880	15.000	401.580	4.378.335	-	-
14	SELIMBAU	-	-	-	450.010	54.741	27.000	403.819	10.181.906	-	-
15	SUHAIID	-	-	122.663	400.032	-	100.052	79.018	457.180	-	-
16	SEBERUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SEMITAU	125.641	-	-	-	-	-	-	438.173	-	-
18	EMPANANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PURING KENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BADAU	-	-	-	-	-	-	-	1.080.248	-	-
21	BATANG LUPAR	-	-	-	-	-	-	-	1.073.710	-	-
22	EMBALOH HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PUTUSSIBAU UTARA	-	655.859	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.600.654	1.126.395	796.792	2.908.740	1.420.573	196.100	1.439.128	19.814.418	1.200	30.304.000
		JUMLAH PRODUKSI									30.304 Ton

Sumber Data: Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023

Berdasarkan table diatas maka dapat kita lihat besaran produksi pembudidaya berdasarkan jenis budidaya yang ada di kabupaten Kapuas Hulu.

1. Keramba :

- 1) jenis Ikan yang produksinya paling banyak adalah ikan Baung dengan produksi 1.167.332 Kg yang berada di Kecamatan Bunut Hilir, yang kedua adalah : 99.880 Kg yang berada di kecamatan Jongkong.
- 2) Jelawat dengan produksi 100, 052 di l kecamatan Suhaid, yang ke 2 dengan produksi 27.000 Kg berada di Kecamatan Selimbau.
- 3) Ikan Patin dengan produksi 470.991 Kg di kecamatan Embaloh Hilir, Sedangkan dengan produksi 403.819 Kg berada di daerah Selimbau.

- 4) Toman paling banyak di produksi budidaya adalah kecamatan Selimbau dengan total produksi yaitu 10.181.906 Kg yang ke 2 adalah Kecamatan Jongkong sebesar 4.378.335 Kg.

2. Kolam

- 1) Nila produksi paling tinggi berada di kecamatan Hulu Gurung yaitu 1.765.454 Kg yang ke 2 yaitu kecamatan Pengkadan 278.846 Kg
- 2) Lele Khusus untuk lele produksinya ada pada kecamatan Putussibau Selatan sebesar 470.536 Kg.
- 3) Bawal Air Tawar dengan produksi 368.096 Kg ada di kecamatan Hulu Gurung, yang ke 2 ada di Kecamatan Pengkadan sebesar 306.033 Kg.
- 4) Patin : untuk ikan Patin dengan produksi 1.220.688 berada di Putussibau Selatan yang ke 2 dengan produksi 400.032 Kg ada di kecamatan seberuang.

3. Minapadi :

Untuk Budidaya Minapadi dengan produksi 1.200 Kg berada di kecamatan Hulu Gurung.

Tabel 5.3 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produksi budidaya Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (on)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya	Ton	30.000	30.304	101, 01
Capaian Kinerja Sangat berhasil (101, 01 %)					101, 01

Tabel 5.4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Ton)	Realisasi Tahun 2023 (Ton)	Tingkat kemajuan (%)
1	Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya	25.990	30.304	117
Tingkat Kemajuan sebesar				117 %

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya Tahun 2023 sebesar 101, 01 % dikategorikan “Sangat berhasil”.

Tabel 5.5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi budidaya Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (on)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	25.482	35.079	138
Capaian Kinerja Sangat berhasil (138 %)					138

Tabel 6.1 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Ton)	Realisasi Tahun 2023 (Ton)	Tingkat kemajuan (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya	25.990	35.079	135
Tingkat Kemajuan sebesar				135

Realisasi kinerja Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 mencapai 30.304 ton Realisasi kinerja tahun 2023 tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 30.000 ton.

Realisasi kinerja indikator meningkatnya produksi Ikan budidaya tahun 2023 sebesar 30.304 ton jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 35.543 ton, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan produksi sebesar 4.775 Kg

Realisasi indikator kinerja jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 30.304 ton jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 25.990 ton, maka tingkat kemajuan indikator Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya sebesar 117 %. Walau secara target telah melampaui, tetapi secara jumlah produksinya menurun dari tahun 2022 yaitu sebesar 4.775 Kg

Hal ini dikarenakan salah satunya adalah

Hal ini karena adanya kendala diantaranya adalah:

1. Terjadinya penurunan produksi pada UPR Masyarakat Mandiri karna tidak adanya kegiatan swakelola yang bersumber dari DAK
2. Kegiatan pelatihan baru bisa di laksanakan pada bulan Desember tahun 2023
3. Adanya usulan untuk bantuan excavator dan budidaya ikan sistem bioflok yang proses pengajuan proposal diusulkan oleh Penyuluh
4. Kegiatan penyaluran bantuan calon induk arwana super red dan calon induk arwana brazil albino baru bisa tersalurkan di bulan desembe.
5. Keterlambatan penyelesaian administrasi berupa proposal kelompok
6. Kegiatan baru bisa terlaksanan setelah oerubahan anggaran
7. Terbatasnya anggaran yang alokasi untuk kegiatan pelatihan
8. Terkait ijin bukan menjadi kewenangan Dinas Perikanan lagi karna setiap pelaku usaha bisa membuat ijin di aplikasi OSS yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Rendahnya pembelian benih pada UPR Masyarakat Mandiri
10. Tidak adanya kegiatan swakelola yang bersumber dari DAK
11. Terjadinya Serangan Hama pada lahan Minapadi
12. Kurangnya Minat Pembudidaya di Minapadi
13. Kurangnya Pengetahuan Tentang Minapadi
14. Harga Pakan yang Tinggi
15. Adanya masyarakat yang menolak memberikan data terkait produksi ikan arwana super red dikarenakan takut dikenakan pajak
16. Tidak adanya tempat penampungan hasil produksi ikan konsumsi
17. Rendahnya arga ikan konsumsi
18. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2023
19. Proposal kelompok yang belum lengkap
20. Tidak terlaksananya pengadaaan benih ikan nila karena tidak ada pelaku usaha yang mendaftar pada E-katalog local
21. Masih adanya penjualan/pemyebaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan SNI
22. Masih ditemukan banyaknya kematian ikan hias arwana super red dan ikan konsumsi
23. Masih ada pembudidaya yang belum melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

Dan kendala tersebut dapat diatasi dengan cara :

1. Menginformasikan stock benih yang tersedia di UPR masyarakat mandiri
2. Agar mengatur waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai RAK (Rencana Anggaran Kegiatan
3. Melakukan koordinasi serta komunikasi yang intens dengan Penyuluh
4. Memproses pengadaan lebih cepat lagi dengan penyelesaian administrasi berupa proposal kelompok

5. Menambah anggaran untuk kegiatan pelatihan
6. Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan anggaran pelatihan
7. Melakukan komunikasi yang intens dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Memberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
9. Memberikan pendampingan serta menginformasikan stock benih yang tersedia di UPR masyarakat mandiri
10. Memberikan sosialisasi pihak yang berwenang terkait penarikan pajak
11. Menyampaikan kepada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
12. Menginformasikan kepada OPD yang terkait Dinas Koperasi, Ukm, Dan Perdagangan
13. Menyegerakan dalam penyelesaian administrasi proposal kelompok
14. Melakukan sosialisasi serta mendorong pelaku usaha yang memiliki ijin untuk mendaftar aplikasi E-Katalog
15. Mensosialisasikan terkait penggunaan obat-obatan yang harus sesuai dengan SNI
16. Melakukan di laboratorium UPT-Bi terkait indikasi terhadap penyebab kematian ikan tersebut
17. Mensosialisasikan pentingnya melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada seluruh pembudidaya ikan

Adapun program yang mendukung sasaran 3 Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya antara lain :

1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
4. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
5. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
12. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan

Sasaran "*Meningkatnya Produksi hasil olahan ikan*" bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pelaku pengolah hasil perikanan. Cara mengukur jumlah produksi ikan olahan adalah penjumlahan dari produk olahan hasil perikanan yang terdiri dari kerupuk basah, kerupuk kering, ikan asin , ikan asap dan lain-lain rumus perhitungannya adalah :

Total Produksi = (kerupuk basah+kerupuk kering+ikan asin+ikan asap dan lain-lainnya)

Untuk mengukur "Meningkatnya jumlah Produksi Ikan Olahan", dilakukan survey oleh enumerator, pengolah data dan validator dan buckup validator bidang yang ada pada bidang P2HK. Metode tersebut dilakukan dengan metode wawancara dan survei pada lokasi untuk menambah jumlah pengolah (pelaku usahanya) dan atau penambahan produk olahan. Permasalahan yang timbul dalam membina pelaku usaha antara lain: biaya oprasional besar dan jangkauan Masyarakat jauh dari ibukota Kabupaten sehingga pembinaan kepa kelompok pelaku usaha tidak maksimal.

Tabel. 6.2 Produksi Olahan Hasil Perikanan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023

No	Kecamatan	Komoditas (Ton)					Jumlah
		Kerupuk basah	kerupuk kering	Ikan Asap	Ikan Asin	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putussibau Utara	131					131
2	Putussibau Selatan	118					118
3	Bika				77		77
4	Semitau	269	458	230	348	53	1358
5	Suhaid	346	664	282	478	113	1883
6	Selimbau	354	925	402	612	192	2485
7	Jongkong	482	998	181	522	184	2367
8	Bunut Hilir	365	451	192	375	101	1484
9	Embaloh Hilir	286	243	153	253	68	1003
10	Embaloh Hulu	89	222		105	39	455
11	Batang Lupar	54	26	67	89	20	256
12	Badau	35	21	49	97		202
13	Empanang	33	26	68	95		222
14	Silat Hilir	78	79	80	88	31	356
Jumlah							12.397

Sumber data : Bidang P2HK Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu Tahun 202

Tabel. 6.3 Produksi Olahan Hasil Perikanan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KOMODITAS (ton)					JUMLAH
		KERUPUK BASAH	KERUPUK KERING	IKAN ASAP	IKAN ASIN	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putussibau Utara	114,80	-	-	-	-	114,80
2	Putussibau Selatan	97,90	-	-	-	-	97,90
3	Bika	-	-	-	76,80	-	76,80
4	Semitau	254,10	450,20	225,40	342,00	48,46	1.320,16
5	Suhaid	320,70	651,90	274,80	468,20	107,20	1.822,80
6	Selimbau	316,00	899,30	386,50	597,40	180,60	2.379,80
7	Jongkong	435,10	981,20	153,84	501,62	173,10	2.244,86
8	Bunut Hilir	330,10	385,90	180,66	352,84	96,54	1.346,04
9	Embaloh Hilir	260,20	225,60	144,30	245,80	65,34	941,24
10	Embaloh Hulu	85,90	222,30	-	104,70	35,14	448,04
11	Batang Lupar	49,90	26,40	63,60	85,85	12,50	238,25
12	Badau	30,50	19,60	44,20	90,89	-	185,19
13	Empanang	32,90	25,70	64,80	91,50	-	214,90
14	Silat Hilir	72,40	75,40	78,40	83,70	25,32	335,22
JUMLAH		2.400,50	3.963,50	1.616,50	3.041,30	744,20	11.766,00

Sumber data: Bidang P2HK Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2022

Jika kita melihat Tabel produksi diatas, maka dapat kita lihat ada 5 jenis olahan yang bis akita lihat produksinya yaitu:

1. Kerupuk basah

Data menunjukkan bahwa kecamatan Jongkong produksi kerupuk basah ada pada urutan pertama yaitu : 482 Ton, yang ke 2 adalah Bunut Hilir dengan total produksi 365 ton

2. Kerupuk Kering.

Produksi Kerupuk di kab.Kapuas Hulu ada pada kecamatan Jongkong dengan produksi 998 Ton, urutan ke 2 adalah Kecamatan Selimbau dengan produksi 925 Ton

3. Ikan Asap

Untuk produksi ikan Asap produksi paling tinggi ada pada kecamatan Selimbau dengan produksi 402 Ton, yang ke 2 ada pada kecamatan 282 Ton yaitu kecamatan Suhaid

4. Ikan Asin

Penghasil Ikan Asin tertinggi pada tahun 2023 dengan produksi 612 Ton ada di kecamatan Selimbau. Yang ke 2 yaitu produksinya 522 Ton ada di kecamatan Jongkong.

5. Lain-lain

Untuk pruduksi selain dari ke 4 produk diatas maka masuk ke dalam kelompok ke 5 dengan produksi 192 Ton yaitu kecamatan Selimbau dan jongkong dengan produksi.

Beberapa factor yang mendukung tercapainya produksi antara lain :

1. Jumlah Poklahsar yang menerima bantuan pada tahun 2023 sebanyak 14 Kelompok yang berasal dari bantuan Dana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP).
2. Poklahsar Cemara, Desa Tembang, Kecamatan Bunut Hilir berupa 1 Set Bantuan Sarana Peralatan Pengolahan;
3. Poklahsar Dunia Usaha, Desa Jongkong Kiri Hulu, Kecamatan Jongkong berupa bantuan Chest Freezer 1 Unit;
4. Poklahsar Mitra Usaha, Desa Jongkong Kiri Hulu, Kecamatan Jongkong berupa bantuan Chest Freezer 1 Unit;
5. Poklahsar Wanita Danau Kayan Berdaya, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara berupa bantuan Chest Freezer 1 Unit;
6. Poklahsar Kedaung Indah, Desa Nibung, Kecamatan Selimbau berupa bantuan Coolbox 6 buah;

7. Poklaksar Kerangan Sisit, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara berupa bantuan Coolbox 6 buah;
8. Poklaksar Maju Bersama, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara berupa bantuan Coolbox 6 Buah;
10. Poklaksar Wanita Berkarya, Desa Nanga Palin, Kecamatan Embaloh Hilir berupa bantuan Coolbox 5 Buah;
11. Poklaksar Gudang Ikan D&P 88, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan berupa bantuan Coolbox 6 Buah;
12. Poklaksar Taman Tapah Maju, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara berupa bantuan Coolbox 6 Buah;
13. Poklaksar Pantas Bersatu, Desa Nanga Sambus, Kecamatan Putussibau Utara berupa bantuan Coolbox 6 Buah;
14. Poklaksar Beringin Jaya, Desa Tembang, Kecamatan Bunut Hilir berupa bantuan Coolbox 5 Buah;
15. Poklaksar Lubuk Sibau, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara berupa bantuan Coolbox 6 Buah;
16. Poklaksar Rasa Baru, Desa Nibung, Kecamatan Selimbau berupa bantuan Coolbox 6 Buah.

Tabel 6.4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan	ton	12.000	12.395	103,3

Tabel 6.5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2026 (Ton)	Realisasi (Ton)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan	13.000	12.395	95,3

Tabel 3.12
Tabel 7.1 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya jumlah produksi ikan olahan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
1	2	3	4	6	7
1	Jumlah hasil produksi ikan olahan (ton pertahun)	ton	11.700	11.766,	100,6

Tabel 7.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2026 (Ton)	Realisasi 2022 (Ton)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah hasil produksi ikan olahan (ton pertahun)	13.000	11.766	90,5

Jika kita membandingkan Kinerja Sasaran dengan Analisis pencapaian akhir(Tingkat kemajuan) pada tahun 2023, maka terdapat peningkatan yang signifikan Dimana. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan tahun 2023 sebesar 103, 3 % di katagorikan Sangat berhasil.

Realisasi kinerja Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan tahun 2023 mencapai 12.395 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 11.766 Ton maka ada peningkatan produksi sebesar 629 Kg.

Realisasi kinerja Jumlah hasil produksi ikan olahan (ton pertahun) tahun 2023 sebesar 12.395 Ton jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 13.000 maka tingkat kemajuan indicator Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan tahun 2023 mencapai 95, 3 % sedangkan pada tahun 2022 tingkat kemajuan indicator 90, 5 % dengan demikian pada tahun 2023 ada peningkatan. Hal ini di dukung oleh sub kegiatan antara lain:

1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

B. REALISASI ANGGARAN

1. Pengelolaan Belanja Dinas

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *'value for money'*. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi Pendapatan selama Tahun 2023 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perikanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.85.000	2.338.500	78 %
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.900.000	2.868.800	98,92 %
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.900.000	2.259.300.00Rp	78 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.900.000	1.569.800	54%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.780.000	2.748.000	98,87 %
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.179.997	143.366.038	99,44 %
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.439.125.502	3.125.179.940	91 %
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	294.090.000	286.090.000	97%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.060.000	6.988.625	98,99%
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.370.000	6308.850	99,94 %
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.860.000	10.357.625	87 %
12	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	59.869.053	58.915.000	98%
13	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.391.500	3.864.775	88,01%
14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.300.000	13.300.000	100 %
15	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.424.000	1.344.700	94 %
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	11.000.000	100 %
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.240.000	22.240.000	100 %
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	2.400.000	100 %
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	100 %
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	100 %
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.727.400	295.727.341	99,99 %

22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.525.600	4.202.800	92,9 %
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.800.000	11.790.000	99,9 %
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	100 %
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.240.000	96.394.379	70 %
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.075.000	6.075.000	100 %
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.843.339.616	1.841.878.738	99,92 %
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.699.400	218.690.000	99,99%
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.800.000	5.751.000	53 %
30	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	63.598.498	63.417.800	99,72 %
31	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	142.824.000	142.710.800	99,92 %
32	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	569.763.502	569.316.600	99,92 %
33	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	36.046.200	35.440.300	98 %
34	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	16.560.000	16.560.000	100 %
35	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	63.037.000	62.733.126	99,58%
36	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	19.890.900	19.813.100.00	99,61 %
37	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	12.561.000	11.998.800	96 %
38	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	9.989.500	9.963.500	99,74 %
39	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	28.895.250	28.681.659	99 %
40	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	32.089.000	31.802.450	99 %
41	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.667.000	4.656.800	99,78 %
42	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.475.000	4.481.650	82 %
43	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.448.300	42.424.180	99,94 %
44	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.097.491.000	1.096.531.800	99,91 %
45	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	682.032.200	560.060.200	82,12 %
46	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.206.000	11.197.00	99,92 %
47	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	12.287.000	12.272.000	99,88 %
48	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	19.390.900	19.211.600	99 %
49	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.834.000	58.834.000	100 %
50	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	77.700.800	77.443.425.00	99,67%
51	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.386.000	45.903.750	99 %
		9.601.989.718	8.976.410.001	93,48 %

Sumber data : Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-O) Dinas Perikanan tahun 2023
Data diambil sampai dengan bulan Desember 2023.

1. Analisis Penggunaan Sumberdaya Keuangan

Analisis penggunaan sumberdaya keuangan terhadap capaian kinerja dapat diukur dengan menghitung capaian kinerja dikurangi capaian anggaran. Sehingga tingkat efisiensi dari perbandingan realisasi capaian kinerja dengan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat (Efisiensi %)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	B	B	6.578.697.068	6.199.221.111	94, 23	Tidak diperbandingkan
2	Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap	Produksi Ikan Tangkap (Ton/Tahun))	26.511	26.657	100, 6	891.829.200	890.178.626	99, 81	1, 19
3	Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton/Tahun)	30.000	30.304	101, 01	1.936.255.650	1.763.663.089	91, 09	9, 91
4	Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (Ton/Tahun)	12.000	12.395	100,6	182.920.800	182.181.175	99, 60	1
Capaian yang di nilai 3									12, 1
Tingkat Efisiensi sebesar (Sangat berhasil)									4, 03

Tabel 7.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat (Efisiensi %)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1. Nilai Reformasi birikrasi	BB	BB	100	6.521.650.477	6.466.195.087	99, 15	0, 99
2	Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap	Produksi ikan Tangkap dalam (ton pertahun)	26.120	25.665	98	1.923.010.000	1.873.619.682	97, 43	0, 54
3	Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya	Produksi ikan budidaya dalam (ton pertahun)	25.482	35.079	138	6.230.338.550	3.704.308.450	59, 45	78, 6
4	Meningkatnya produksi ikan olahan hasil	Jumlah hasil produksi ikan olahan (ton pertahun)	11.700	11.766	100,6	690.342.150	688.497.247	99, 73	0,87
Capaian yang di nilai 4									81

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan jika dibandingkan dari capaian kinerja B (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 6.578.697.068 (99, 15) dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 1,19 %. Tetapi Karena metode penilaiannya berbeda maka penilaiannya Tidak diperbandingkan Sasaran, meningkatnya produksi ikan tangkap dengan anggaran sebesar 891.829.200 dan dengan capaian produksi 99, 81 dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 1, 19 Sasaran meningkatnya produksi Ikan Budidaya dengan anggaran sebesar 1.936.255.650 sedangkan realisasinya sebesar 1.763.663.089 hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan budidaya yang tidak terlaksana atau, Capaian Efisiensinya lebih tinggi dari bidang yang lainnya. Yaitu sebesar 9, 91 Sasaran meningkatnya produksi Ikan Olahan dengan anggaran sebesar 690.342.150 realisasi anggaran sebesar 688.497.247 dengan capaian 99, 60 dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 1 %

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi, dengan predikat “Sangat Berhasil”, hal ini ditandai dari empat sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah mencapai target dan sasaran target yang telah ditetapkan pada Renstra. Dengan demikian, pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, namun secara bertahap mengalami perbaikan dan peningkatan walaupun belum secara signifikan baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hal ini disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Sumber Daya Aparatur dan Pelaku Perikanan meliputi :
 - a. Keterbatasan Tenaga terutama tenaga penyuluh dilapangan
 - b. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang belum Optimal
 - c. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan serta Kelompok Pengolah Hasil Perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan
 - d. Inovasi untuk meningkatkan produksi masih dirasakan kurang.
2. Dukungan Sarana meliputi :
 - a. Sarana Mobilitas perlu ditingkatkan secara kuantitas
3. Dukungan Permodalan dan Pemasaran Hasil Perikanan:

- a. Keterbatasan kemampuan permodalan Pembudidaya/Nelayan untuk mengembangkan usahanya.
- b. Terbatasnya kegiatan pemasaran dan distribusi/pengangkutan hasil-hasil perikanan.
- c. Masih belum optimal promosi atau terekspos produk perikanan baik produk budidaya maupun olahan.

Luasnya sebaran perairan umum yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan daya jangkau masih yang cukup sulit dan memerlukan alokasi dana yang cukup besar masih menjadi kendala secara teknis serta kuantitas dan kualitas SDM guna mendukung memenuhi luasnya sebaran. Guna mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan kegiatan lebih terarah serta tepat guna dalam menyusun Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian anggaran yang berbasis kinerja dengan tolak ukur Renstra dan standar analisa belanja serta dilengkapi peningkatan standar pelayanan minimal.
2. Membangun, merehabilitasi serta mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pemasaran hasil usaha perikanan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pemanfaatan bahan baku pakan alternatif yang murah dan mudah didapat.
4. Terus meningkatkan pemberdayaan pelaku pembudidaya ikan serta nelayan melalui pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan keterampilan, penguasaan teknologi serta pengembangan kelembagaan
5. Sektor perikanan harus berorientasi pada ekspor, baik secara lokal, maupun secara nasional, hal dapat didukung melalui industrialisasi melalui komoditas utama yang ada Di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pengelolaannya, pola kemitraan antara industri, pemerintah dan
6. masyarakat harus terjalin. Melalui industrialisasi, akan memberikan benih dan material lainnya untuk kemudian di budidayakan. Pemerintah juga harus berperan sebagai pembuat regulasi diantaranya dalam pengendalian harga sehingga tetap bisa bersaing di pasar luar.

7. Peningkatan kualitas sumberdaya kelembagaan serta pranata sosial di kalangan masyarakat pengelola sumberdaya ikan sehingga akses sumberdaya modal akan semakin dekat dan kuat.
8. Membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pelestarian sumberdaya kelautan dan pengembangan basis data.
9. Terus Meningkatkan kegiatan promosi produk perikanan di berbagai kesempatan Pameran dengan harapan adanya kerjasama pemasaran atau investasi kesektor perikanan

Keberhasilan pembangunan Perikanan bergantung pada partisipasi seluruh stakeholders perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka faktor kerjasama dan koordinasi diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan selain itu pembangunan perikanan juga tergantung dari sistem pelaksanaan pembangunan yang bottom up dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya pembudidaya ikan dan nelayan sebagai obyek pembangunan perikanan kabupaten Kapuas Hulu.

Akhirnya saran dan masukan yang bersifat membangun dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LAKIP ini.